

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara sosiologis, persentuhan agama dalam struktur sosial masyarakat bukan saja melahirkan beragam corak keberagamaan dalam berbagai aliran dan corak pengalaman beragama, melainkan juga membuat persentuhan saling kait mengait antara kepentingan yang berdimensi keagamaan dengan kepentingan-kepentingan aktual masyarakat, seperti kepentingan ekonomi dan politik. Mazhab Weberian bahkan menggambarkan keterkaitan saling-silang itu dalam rumusan bahwa: : “agama dalam kenyataannya adalah ekonomi, politik dalam kenyataannya adalah agama; dan ekonomi dalam kenyataannya adalah politik”. Agama berwujud dalam bentuk nilai (*value*) aktual yang terkait dengan struktur sosial, status sosial, partai politik, yang memberi makna subjektif dalam kehidupan politik masyarakat¹.

Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hidup dalam bentuk masyarakat majemuk (*plural society*), masyarakat serba ganda, ganda kepercayaannya, kebudayaannya, aspirasi politiknya, ekonominya, bahkan agamanya. Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila². Sikap setuju dalam keragaman, tidak bisa diartikan bahwa semua agama itu sama, melainkan semua agama mengandung ajaran yang baik, tetapi tidak semua agama itu benar dalam keyakinan satu orang. Kebenaran hakiki adalah kebenaran absolut dari tuhan, dan inilah yang dituntut semakin arif dalam memadukan antara kebenaran absolut itu dengan kebenaran relatif pada ukuran manusiawi.

Praktek intoleransi dalam bingkai kekerasan yang mengatasmakan agama dalam bentuk fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air. Konflik Ambon, Papua, dan Poso yang cukup menarik perhatian bahkan telah menjadi

¹ Collins, 1986:7 dalam Haedar Nashir, *Agama dan Mobilisasi Politik Massa, dalam Andito (ed.), Atas Nama Agama*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1998), 172.

² Dewasa ini banyak kalangan yang membicarakan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini. Pancasila kini mulai terpinggirkan dari kancan pergaulan kebangsaan dan imbasnya ada banyak yang memulai menawarkan alternatif ideologi lain untuk menggantikan ideologi bangsa ini. Dalam fakta sejarah, Pancasila telah membuktikan cara terbaik (*the right way*) bagi masyarakat Indonesia untuk mendeskripsikan ideologi negara. Pancasila seolah menjadi ringkasan dari kompromi dan persetujuan para *founding father's* dalam mendirikan NKRI. Bilhusus dalam tahun politik, maka isu *Pancsilais* dan tema *Pancasila* menjadi *magnet* yang banyak menarik perhatian. Isu dan tema ini menjadi semacam garansi ganda, di satu sisi sebagai penguatan bahwa dengan menyebutkan isu dan tema ini dilekatkan kepada dirinya seolah dirinya adalah seseorang atau kelompok yang memiliki “*commitment*” dan sekaligus penegak-penjaga dasar Negara ini. Sedangkan di sisi lain dengan menyebut dan melekatkan dirinya dengan isu dan tema ini adalah kondisi seolah sedang memegang senapan canggih dengan peluru tajam sekaligus panas dalam melumpuhkan lawan-lawan politiknya.

berita dan isu global yang penting. Gerakan ini menjadi semakin membesar dan terus meningkat, di Tahun 2017 dan 2018 saja telah terjadi beberapa kasus besar, diantaranya ancaman bom di kelenteng Kwan Tee Koen Karawang, perusakan tempat ibadah seperti perusakan Masjid di Tuban dan Tanjung Balai, perusakan Pura di Lumajang, persekusi terhadap tokoh agama sebagaimana terjadi di Lamongan, Bandung dan Bekasi, penodaan agama dalam bentuk pernyataan, *meme*, dan bermacam propaganda, sampai yang paling mutakhir saat menulis akhir disertasi ini adalah “penistaan” agama dalam bentuk pembakaran bendera kalimat *thoyyibah Laa Ilaha Illallah* di Kabupaten Garut. Kejadian-kejadian intoleran sebagaimana dijelaskan di atas adalah beberapa kasus yang mempresentasikan bentuk-bentuk kekarasan yang mengaitkan agama dengan kondisi sosial politik secara *resiprokal* (timbang balik).

Dalam percaturan nasional, sebenarnya kita belum lupa melihat perkembangan gejala kebangsaan yang memanas, khususnya di ibukota Jakarta yang seakan merefleksikan pemikiran kita kembali tentang label terkenal yang dimiliki Indonesia, yakni bangsa yang majemuk. Nasikun³ membagi kemajemukan Indonesia menjadi dua (2) paradigma, yaitu: *pertama*, kemajemukan vertikal, yakni perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan, dan keadilan sosial, dan *kedua*, kemajemukan horizontal meliputi perbedaan suku, agama hingga kedaerahan. Menurutny sebagai masyarakat majemuk Indonesia juga rawan dengan namanya konflik. Masyarakat majemuk (*plural*) yang rawan konflik-konflik dapat terus menerus terjadi di setiap waktu dan tempat. Konflik biasanya bersumber dari perbedaan dan setiap perbedaan pasti mempertahankan eksistensinya.

Keberagaman agama di Indonesia berpotensi besar dalam memunculkan *the splinter group* yang dapat berbeda, bahkan sangat jauh dari *mainstream*. Di sisi lain aliran kepercayaan yang sudah mengakar dengan budaya lokal telah menghasilkan suatu sintesa dengan beragam keyakinan⁴. Diskursus radikalisme dan terorisme⁵ atas nama agama tidak

³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 11.

⁴ Atho M. Mudzhar, *Pengaturan Berbahasa Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan berbagai Negara*, Makalah yang disajikan pada Jurnal Balitbangdiklat.kemenag.go-id.pdf).

⁵ Oots dalam Riza Sihbudi, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 57-58) memberikan beberapa kriteria tentang Terorisme, sebagai berikut: (1) *Terrorisme may be a psychological or military act designed to create fear, or cause material or economic destruction* (terorisme bisa berupa sebuah tindakan psikologis ataupun militer yang didesain untuk menciptakan ketakutan, atau menyebabkan kerusakan materi ataupun ekonomi); (2) *Terrorisme may be a method of constraining the behavior of others. This is often done through attacks on victim other than the real target to act* (teroris dapat berupa sebuah metode untuk membatasi perilaku orang lain. Ini sering dilakukan melalui serangan-serangan terhadap korban-korban yang bukan merupakan target yang sesungguhnya); (3) *Terrorisme has been described as a crime committed for publicity* (terorisme telah digambarkan sebagai sebuah perbuatan criminal yang dilakukan untuk mendapatkan publisitas); (4) *Terrorisme may be a crime with a political purpose* (terorisme

saja menjadi konsumsi kaum intelektual semata. Wacana ini telah menjadi isu praksis kontemporer secara global dan Indonesia ikut menerima implikasi langsung, berbagai peristiwa yang dikategorikan terorisme, sebut saja yang terakhir peristiwa Jakarta di tahun 2017 ini adalah bukti nyata aksi para teroris. Yang memprihatinkan, peristiwa ini memiliki keterkaitan langsung maupun tidak dengan dua (2) variable, yakni *pertama*, justifikasi ideologi agama (tertentu) dan *kedua*, pembiakannya melalui instrumen pendidikan.

Tema Radikalisme dan terorisme berbasis agama kembali menjadi diskursus belakangan ini. Hal ini ditandai oleh serangkaian peristiwa memilukan di tanah air. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan betapa tindak kejahatan terorisme terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*crime against humanity*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dianggap sebagai tindakan wajar oleh sebagian kecil masyarakat di tanah air. Lebih dari itu, tidak kekerasan diikuti dengan penggunaan simbol-simbol agama sebagai pembenaran aksi-aksi kekerasan (*legitimation of violence acts*) yang berwujud pada tindakan-tindakan terorisme berbasis agama.

Seringnya konflik dan pertikaian yang menggunakan “baju agama” atau atas nama agama, merebaknya terorisme, saling mencurigai, dan pengrusakan tempat-tempat beribadah, membuktikan kegagalan para penganjur ‘perdamaian’ di dalam tubuh agama. Oleh karena itu adanya keberanian untuk mengajak semua kekuatan agama dalam melakukan perubahan-perubahan harus dilakukan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Format pendidikan berbasis keanekaragaman akan memungkinkan dekonstruksi terhadap teologi agama yang cenderung eksklusif dan dogmatis. Teologi inilah yang kerap menjadi sifat laten ketidakharmonisan masyarakat agama dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan bernegara-

dapat berupa sebuah tindakan criminal bertujuan politis); (5) *Terrorisme may be described a purposive violence* (terorisme dapat digambarkan sebagai kekerasan yang mempunyai tujuan); (6) *Terrorisme may be a criminal act committed for political or economic gain* (terorisme dapat berupa sebuah criminal yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik ataupun ekonomi). Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2002, yang kemudian berubah menjadi “Undang-undang Anti Terorisme Republik Indonesia”, telah memberikan ciri-ciri tindakan terror, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Dan pada Pasal 7 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

bangsa. Disinilah tantangan bagi agama untuk mengembalikan perannya di tengah pluralisme yang ada.

Di berbagai daerah muncul beragam sekte (faham atau aliran baru dan berbagai faham keagamaan lama) yang dikategorikan sebagai penodaan atau penistaan agama terhadap agama tertentu. Dan yang paling aktual adalah kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di Kepulauan Seribu yang dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Tema besarnya diksi Ahok (sebutan populer sang Gubernur) terhadap ayat Qur'an surat Al-Maidah 51⁶ yang menimbulkan kontroversi yang hampir menarik sebagian besar energi bangsa. Tulisan ini tentu, tidak akan mengupas kandungan dan proses kejadian dari pidato dan seluruh konsekuensi politiknya yang terjadi. Dan yang ingin dikaitkan dalam tulisan ini adalah secara khusus mengenai dampak panjang kemarahan Umat Islam secara garis besar, terutama yang berpandangan sangat fundamentalis terkait dengan kasus ini. Secara umum, adalah upaya mengantisipasi kejadian ini tidak terjadi terus menerus di masa depan, melakukan resolusi konflik tanpa kembali kepada konflik, dan yang paling penting adanya sebuah proses dalam mempersiapkan generasi masa depan yang lebih cerdas dalam memahami situasi keragaman.

Aksi Bela Islam 4-11 dan 2-12, dan dilanjutkan dengan aksi-aksi lainnya, baik yang terjadi di pusat kekuasaan yang menjadi *setting* kasus ini terjadi, dan mengemuka ke daerah-daerah yang terus berjalan saat tulisan inipun dikerjakan. Ini adalah bukti bahwa ada semacam “energi tersimpan” yang sekali-kali bisa menjadi “bom waktu” yang kapan saja siap meledak ketika sebuah keyakinan terusik, apalagi momen yang terjadi untuk kasus di atas berhimpitan dengan momentum politik pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Will Durrant seperti yang dikutip Murtadha Muthahari⁷ menjelaskan bahwa “agama memiliki seratus jiwa. Segala sesuatu bila telah terbunuh, pada kali pertama itu pun ia sudah mati untuk selama-lamanya, kecuali agama. Sekiranya ia seratus kali dibunuh, ia akan kembali muncul lagi dan kembali hidup setelah itu”. Artinya aksi bela Islam yang terjadi tahun 2016 dan 2017 adalah representatif dari jiwa keagamaan, yang tidak sekedar persoalan

⁶ Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang Zalim*”.

⁷ Will Durrant, *The Lesson of History dalam Murtadha Muthahari, Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan), 41.

teologis, melainkan konvergensi kepentingan antara *oligarkhi* dalam *lanskap* politik electoral. Demikian agama sedang diuji keterandalannya, disamping juga akan terurai model dan typologi orang dalam melakukan tata cara beragama dan konteks keberagamaannya.

Agama tidak lagi mengandalkan sebagai kesatuan entitas⁸ (*entitas integrity*), kekuatan pendorong (*driving force*) menuju tatanan *rahmatan lil'alam*⁹. Agama juga bukan lagi menjadi entitas yang mendamaikan, menyejukkan, dan menciptakan keharmonisan bagi masyarakat beragama. Sebaliknya, agama seolah hadir sebagai entitas destruktif, radikal, dan teroris yang cukup ampuh dalam menciptakan berbagai tindakan pelanggaran HAM berat.

Charles Kimbal¹⁰ menyebutkan adanya 5 (lima) situasi, bahwa agama sangat berpotensi untuk berintegrasi dengan tindakan kekerasan. *Pertama*, agama mengklaim kebenarannya sebagai kebenaran mutlak dan satu-satunya; *kedua*, agama dibarengi dengan ketaatan yang berlebihan; *ketiga*, ketika umatnya mulai merindukan zaman ideal di masa lalu dan bertekad merealisasikannya pada masa sekarang; *keempat*, ketika tujuan tertentu menghalalkan segala cara¹¹ dan; *kelima*, ketika agama memotivasi perang suci (*holy war*).

Oleh karena itu, dengan melihat potensi kekerasan dengan mengatasnamakan agama, maka dibutuhkan upaya-upaya diseminatif¹² yang dapat meminimalisir dan menjamin bahwa kejahatan atas nama agama di atas tidak lagi terulang di masa datang. Memang tidak ada jaminan bagi siapapun bahwa radikalisme atau terorisme berbasis agama tidak akan terjadi lagi. Hal ini mengingat konseptor, para penganut, perancang (*desainer*) bom dan ideologi serta pembiakan jaringan sel-sel radikalisme belum terputus, artinya mungkin masih cukup

⁸ *Entitas (entity)* adalah sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik.

⁹ Istilah ini adalah penyebutan terhadap sifat risalah kenabian Muhammad SAW sebagai pembawa panji-panji Islam yang mendamaikan, yakni sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, merujuk kepada Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107: "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*". Berdasarkan hal tersebut, maka tatanan yang *rahmatan lil'alam* berarti tatanan yang beradab, yang menghadirkan suasana tenteram, penuh kedamaian, rahmat dan salam.

¹⁰ Penulis Amerika yang menulis buku *When Religion becomes Evil* yang dibahasa Indonesiakan menjadi *Kala Agama Jadi Bencana*, terbit tahun 2013 yang diterbitkan oleh Harper San Fransisco. Kimbal adalah seorang pendeta Kristen Baptis, yang dibesarkan oleh keluarga Yahudi dan memperoleh gelar Doktor Teologi (Th.D) dari Harvard University pada jurusan Perbandingan Agama dengan spesialisasi Studi Islam. Meski Kimbal seorang pendeta Kristen Baptis, namun di dalam buku ini dia sangat terbuka dalam membicarakan berbagai agama yang ada, dengan berupaya menjelaskan apa yang sesungguhnya tengah terjadi pada agama.

¹¹ Kimbal menyebut bagian ini oleh beberapa motivasi, yaitu: (1) karena mempertahankan tempat suci, (2) untuk melindungi ajaran agama yang dirasa sedang dalam bahaya, (3) untuk mempertahankan identitas kelompok dari dalam dan, (4) untuk mempertahankan identitas kelompok melawan orang luar.

¹² *Deseminasi* (Bahasa Inggris: *dissemination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Dengan kata lain diseminasi merupakan proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.

besar potensinya di tanah air. Namun upaya mengembalikan agama sebagai fungsi *rahmatan lil'alamin* dan agama sebagai spirit yang dapat menciptakan *peace order* (tatanan yang perdamaian) harus dilakukan sejak dini.

Banyak para ahli dan pemuka agama yang telah mengupayakan dengan segala cara untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara umat beragama. Seiring pertikaian dan konflik yang menggunakan “baju agama”, merebaknya aksi-aksi teroris, radikalisme, dan ekstrimisme, cukup membuktikan betapa beratnya para penganjur perdamaian. Di sinilah tantangan bagi pemuka agama dan juga tantangan bagi agama itu sendiri semakin terbuka.

Dengan meminjam bahasa John Lyden, seorang ahli agama, dia mengatakan *what should one think about religions other than one's own?*. Apa yang harus dipikirkan oleh seorang penganut agama yang satu terhadap agama lain. Apakah masih ada anggapan “mereka adalah musuh kita”, karena berbeda keyakinan, apalagi saling mengkafirkan satu sama lain. Oleh karena itu upaya menghadirkan teologi inklusif tentu saja menjadi semakin krusial. Kendati selama ini hal itu sesungguhnya sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum memberikan solusi maksimal dari aspek realisasi dan dampaknya.

Berdasarkan telaah peneliti, belum maksimalnya upaya di atas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, *pertama*, konstruksi dialog antara agama dan antar golongan masih bersifat elitis, di atas kertas, dan semakin formalistik; *kedua*, dialog yang dilakukan terlalu spesifik teologis; *ketiga*, ketulusan untuk menghadirkan diri dan keyakinan dengan jiwa keterbukaan sulit dijumpai, dikarenakan masih ada semangat saling memusuhi; *keempat*, masih segmentatif, yakni kaum terpelajar, cendekiawan, pegiat perdamaian, orang-orang dewasa, sementara ada satu segmen yang seringkali abai dalam permasalahan ini, yakni segmen anak-anak, padahal merekalah pelanjut hubungan harmonis itu dapat dipertahankan, selain juga bahwa jiwa anak adalah jiwa yang masih relatif “bersih” dari kepentingan-kepentingan (*vested interest*). Dan inilah yang menurut peneliti masih minim dilakukan, sementara bahwa anak sekali lagi adalah *investasi masa depan*, harapan dan cita-cita semua manusia, semua golongan, semua keyakinan, dan bahkan semua kekuatan kepentingan dimana pun dan kapan pun. Dalam kaitan ini perlu diteliti secara mendalam sebuah diseminasi pendidikan perdamaian yang dapat menghadirkan jiwa inklusif yang diajarkan sejak dini.

Upaya yang dimaksud adalah mendesain program persemaian pendidikan perdamaian berbasis agama melalui intensifikasi *peace education berbasis agama* di lembaga

pendidikan, seperti sekolah dan madrasah. *Peace education* yang juga seringkali dinyatakan sebagai *peace making* secara sederhana dapat dinyatakan sebagai inisiatif yang dilakukan dalam mengelola konflik dengan menggunakan manajemen perdamaian (*initiaves on conflict and its paecefull management*). Pemaknaan ini, berawal dari pemahaman dasar bahwa konflik dalam proses bermasyarakat dapat menjadi sesuatu yang konstruktif jika dikelola dengan jalan tanpa kekerasan (*if managed in non-violence ways*). Sebaliknya, konflik dalam sebuah masyarakat atau wilayah tertentu akan berubah menjadi kekerasan jika salah dalam mengelolanya.

Definisi ini berangkat dari fakta-fakta yang dihasilkan melalui serangkaian penelitian di Kenya, Sudan, Uganda, Burundi, dan Somalia. Berlarut-larutnya konflik di berbagai negara tersebut bukan karena tidak pernah ada usaha penyelesaian, melainkan karena penyelesaian yang dilakukan tanpa mengindahkan bangunan perdamaian. Akibatnya, konflik yang terjadi justru berimplikasi menghancurkan. Ermaya¹³ menyebutkan bahwa peristiwa di dalam Negara yang bermotifkan SARA, yang tidak jarang disertai dengan radikalisme seperti di Cyprus antara penduduk Yunani dan Turki, di Belgia antara penduduk yang berbahasa Flaams dan berbahasa Perancis, di Canada antara keturunan Perancis dan keturunan Inggris, di Yugoslavia, Syria, Turki, Sri Lanka, India, Ethiopia, Bangladesh, UniSovyet, Fiji, dan banyak negara-negara lainnya. Mungkin unsur-unsur dari luar dapat menyusup dan menanggulangi bentrokan-bentrokan SARA tersebut. Namun, pada dasarnya ia adalah tetap kekerasan politik dalam negeri. Pertikaian SARA sangat berbahaya, kalau tidak dapat diselesaikan, bahkan dapat menghancurkan keutuhan bangsa dan memecahkan negara.

Manusia mulai mengenal sesamanya, budaya kehidupan yang beragam, dan dunia yang lebih global. Dalam kehidupan berbudaya dalam konteks bangsa-bangsa atau antar negara, setiap budaya mempromosikan dirinya untuk menjadi yang tertinggi. Kecendrungan ini berpuncak pada Perang Dunia I dan Perng Dunia II, pasca perang dingin, terorisme, tragedi 11 Maret 2001, tragedi Bali Oktober 2002, dan penyerbuan koalisi Amerika Serikat ke Iraq serta tragedi lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Dalam konteks seperti itulah radikalisme menjadi mendapat perhatian khusus juga sangat serius. Pada saat itulah terkuak secara faktual kecenderungan apa saja yang mewarisi agama di muka bumi ini.

Dunia mungkin juga tidak lupa, ada banyak peristiwa memilukan yang dilatar belakangi oleh sentimen keagamaan, yang menyebabkan tragedi kemanusiaan yang

¹³ Ermaya Suradinata, *Radikalisme dan Masa Depan Bangsa* dalam *Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama* (Tim Editor), (Bandung, Gunung Djati Press, 2006), 4-5.

memilukan dan tentu saja memantik antipati terhadap agama. Diantaranya peristiwa 11092001 yang menghancurkan gedung WTC di Amerika Serikat dengan korban ribuan jiwa, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia yang tiada henti, maupun perang antar Negara yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Semua itu telah membawa kebencian dan ketidakpercayaan akan eksistensi agama-agama yang ada.

Pasca 111101 di WTC Amerika Serikat, maka di Indonesia fenomena terorisme menjadi isu yang selalu dikaitkan dengan sikap keberagamaan. Peristiwa pengeboman secara beruntun, seperti bom Bali I dan II, bom natal, bom kedutaan Australia, bom Marriot dan Ritz Carlton I yang semua terjadi pada tahun 2004, serta bom Marriot dan Ritz Carlton II terjadi kembali pada tahun 2009. Beberapa contoh peristiwa tersebut selalu dikaitkan dengan unsur-unsur agama, sehingga sebagian besar masyarakat menduga bahwa agama menjadi landasan dari semua aksi tersebut. Secara kebetulan aksi-aksi di Indonesia tersebut dilakukan oleh kalangan yang beragama Islam. Dan lebih jauh, pandangan masyarakat semakin meluas dengan mengaitkan antara pelaku, korban, lokasi sasaran, dan isu yang dikembangkan pihak ketiga, tak jarang dijadikan satu tema lain, yakni perang suci (*the holy war*).

Perang suci (*the holy war*) merupakan puncak dari bentuk pertikaian (*conflict*) dalam interaksi sosial, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dan individu dengan kelompok. Istilah “perang suci” bisa juga diartikan sebagai cara manusia dalam melakukan interaksi sosial untuk memelihara, mempertahankan hak hidupnya atau menghancurkan dan menguasai kelompok atau masyarakat lainnya dengan menggunakan nilai tertentu, sebut saja dalam hal ini agama. Perang suci dapat dipahami sebagai pertikaian total yang melibatkan individu atau kelompok dengan mengatasnamakan atau melibatkan persoalan yang dianggap suci (tuhan). Dalam perang ini terdapat beberapa institusi sosial yang saling menjalin, terutama institusi agama dan politik, disamping institusi lainnya.

Institusi agama sering disebut dengan istilah “teology”, dan institusi politik sering disebut istilah “ideology”. Isu-isu yang mewarnai perang tersebut sekaligus menjadi faktor adanya perang suci diantaranya stabilitas sosial (perdamaian), kebebasan, kekayaan, dan perluasan wilayah kekuasaan. Disamping itu terdapat pula terdapat pula isu-isu atau faktor-faktor lainnya yang dianggap sebagai faktor gerakan perlawanan, diantaranya ketidakadilan, kesenjangan sosial, kekecewaan akibat tidak tersalurkannya aspirasi¹⁴.

¹⁴ Afif Muhammad, *Dari Teologi ke Ideologi: Telaah atas Metode dan Pemikiran Teologi Sayyid Qutb*, (Bandung: Pena Merah, 2004), h.xiii.

Charles Kimball¹⁵ lebih jauh menjelaskan bagaimana efek peristiwa 11092001 tersebut, yang telah membawa gejolak di tengah umat manusia dengan memunculkan banyak acara televisi dengan berbagai bahasan tentang keagamaan, menghidupkan banyak seminar dan dialog keagamaan, hingga melibatkan banyak latar belakang agama dan budaya. Agama tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat rumit dipahami, sebab ketika banyak orang menganggapnya sebagai ajaran cinta kasih dari jalan keselamatan, namun disisi lain justru banyak orang yang mencurigainya sebagai sumber masalah, dan sumber kejahatan serta sumber kepiluan dunia.

Dengan segala egosentrismenya, manusia di dunia ini telah membayar mahal dalam melampiaskan egonya. Salah satu yang fenomenal bagi peneliti, diantaranya penderitaan yang dialami oleh akibat radikalisme adalah perang Iraq. Perang ini merupakan perwujudan perang dahsyat antara budaya Arab dengan budaya barat yang berlarut-larut. Bahkan kekerasan terjadi karena tidak adanya penyelesaian yang bisa memenuhi egonya di masing-masing pihak. Belajar dari gambaran ini, kiranya perlu satu upaya keras secara terencana hadirnya budaya baru bagi generasi muda untuk sedini mungkin terantisipasi secara maksimal agar tidak terulang nestapa kemanusiaan berikutnya. Di bagian inilah pendekatan institusional untuk menyiapkan generasi harapan dengan jiwa inklusif, hidup damai, dan asasi sebagai bagian dari keanekaan budaya menjadi sangat krusial dilakukan.

Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah merupakan sarana yang cukup efektif dalam rangka pembentukan jiwa serta semangat bagi generasi muda. Oleh karena itu, maka pembangunan sekolah secara sistematis hendaknya mengambil peran untuk menumbuhkan semangat perdamaian. Pembelajaran ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi tidak akan banyak bermakna tanpa semangat ini. Masa depan bangsa bukan hanya ditentukan oleh individu-individu jenius semata, melainkan oleh kumpulan orang-orang yang mempunyai integritas kebangsaan. Dalam konteks inilah peneliti memberikan perhatian yang prioritas terhadap upaya penanaman nilai de-radikalisasi dan sikap mental inklusif melalui medium pendidikan.

Keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik serta kemampuan ekonomi adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun demikian, keragaman yang seharusnya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum, nampaknya

¹⁵ Dadang Darmawan dalam *Kala Agama Jadi Bencana* (Memahami Pemikiran Charles Kimball), home/2017/April, MedanHeadlines.

belum dijadikan sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam menumbuhkan sikap-sikap untuk menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat.

Noer¹⁶ secara jelas menyebutkan empat (4) faktor penyebab kegagalan pendidikan dalam menumbuhkan pluralisme, yaitu: *Pertama*, penekanannya pada transfer ilmu agama ketimbang proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; *kedua*, sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai “hiasan kurikulum” belaka atau sebagai “pelengkap” yang dipandang sebelah mata; *ketiga*, kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar agama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, suka damai, dan toleransi¹⁷; dan *keempat*, kurangnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain.

Kegagalan agama dalam memainkan operannya sebagai *problem solver* bagi persoalan SARA¹⁸ erat kaitannya dengan pengajaran agama secara eksklusif dan dogmatis. Sekolah saat ini pada umumnya hanya mampu merefleksikan gejala stereotip dan prasangka antar kelompok yang sudah terbentuk, dan tidak sebaliknya sekolah menjadi media mengeleminirnya. Bahkan ada indikasi justru sekolah ikut berkontribusi secara langsung mengembangkan eskalasi ketegangan antara kelompok yang mengkotak-kotakan penyampaian pendidikan agama, isi kurikulum yang etnosentrisme, dan dinamika relasi sosial

¹⁶ Kautsar Azhari Noer dalam Sumartana, *Our Pluralisme and Religious Education in Indonesia, Collection of Article*. (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2001), 21.

¹⁷ Toleransi berasal dari kata *tolerantia* (Latin), *tollerantz* (Jerman). Pada awalnya kata ini dipakai dalam konteks politik. Martin Luther tercatat orang pertama yang mengintroduksinya dalam konteks sosial. Jan Philipp mensketsa ulang toleransi sebagai konsepsi nilai-nilai perdamaian dan kebebasan yang digerakkan oleh hasrat mempelajari satu dengan yang lain untuk mencapai tingkat pro-eksistensi. Isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) berubah seolah tombak bermata dua bagi kepentingan hegemoni Amerika dan negara Barat lainnya terhadap Negara Dunia Ketiga, teraktual menimpa Negara mayoritas berpenduduk Islam, merupakan korban-korban yang mudah kita jumpai. Mengikuti epistemology teori kritis Mazhab Frankfurt, tiada kepentingan tanpa kepentingan (Bertens, 2002), isu-isu tunggangan globalisasi tersebut sarat muatan kepentingan ideologis. Sudut pandang yang dipakai Barat dalam memahami realitas Negara-negara Dunia Ketiga itu dalam atmosfer *superiority* dan konfrontatif. Jelas tidak ada ruang bagi mekarnya tunas toleransi dalam panggung keragaman (*tolerance diversity*). Lihat Fazar Riza Ul Haq, *Membela Islam Membela Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2017), 259.

¹⁸ SARA (Suku Ras Agama dan Antar golongan) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam tiga (3) kategori, yakni : *Pertama, individual*, yaitu tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan; *kedua, institusional*, yakni tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu sintitusi termasuk Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak disengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya; dan *ketiga, kultural*, yaitu penyeberan mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

sekolah yang segregatif¹⁹. Bahkan bukan tidak mungkin segregasi sekolah berdasarkan kepelumukan agama juga ikut memperuncing prasangka dan proses deharmonisasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pendidikan merupakan proses pengalihan kebudayaan, yaitu pemindahan berbagai kearifan, keterampilan, nilai dan pengetahuan, yang terkumpul dalam suatu masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pengalihan kebudayaan tersebut membuat suatu generasi baru yang mampu memikul tanggung jawab, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang ada serta siap terus menerus menambah keahliannya untuk belajar seumur hidup²⁰.

Sebuah inovasi sebagaimana program diseminasi akan berkembang seiring dengan perkembangan manusia jika dalam inovasi tersebut adanya sebuah kesepahaman akan terjadinya perubahan pada sebuah pendidikan yang lebih baik lagi, maka dengan demikian sebuah inovasi harus dipahami dan diketahui dari berbagai sudut pandang untuk mencapai ketercapaian pendidikan yang lebih ideal.

B. Rumusan Masalah

Agama dalam hal ini sikap keberagaman untuk masa-masa mendatang tetap akan berperan penting, bahkan bisa menjadi suatu kekuatan besar bagi kebangkitan kesadaran, tanggung jawab, dan solidaritas global baru. Oleh karena itu, beberapa masalah yang hendak ditelusuri jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program diseminasi *peace education* yang dilaksanakan bagi anak-anak SD Bestari Utami Garut?
2. Bagaimana model pembinaan inklusivisme keberagaman anak-anak SD Bestari Utami Garut?
3. Bagaimana proses pembentukan nilai-nilai interaksi keagamaan anak-anak SD Bestari Utami Garut melalui diseminasi *peace education*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Bagaimana program diseminasi *peace education* yang dilaksanakan bagi anak-anak SD Bestari Utami Garut?

¹⁹ Pengertian *segrerasi* adalah pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa. Segrerasi merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam bentuk struktur sosial.

²⁰ H.M, Darwis Hud, dkk, *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 429.

- b. Bagaimana model pembinaan inklusivisme keberagamaan anak-anak SD Bestari Utami Garut?
- c. Bagaimana proses pembentukan nilai-nilai interaksi keagamaan anak-anak SD Bestari Utami Garut melalui diseminasi *peace education*?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Khazanah keilmuan mengenai pembinaan inklusivisme keberagamaan melalui diseminasi *peace education*.
- b. Transformasi nilai de-radikalisasi dan hidup inklusif di Negara Indonesia yang *plural society* khususnya bagi anak-anak melalui lembaga pendidikan.
- c. Media alternatif untuk mengantisipasi radikalisme yang mungkin terjadi di masa datang.
- d. Rumusan dalam membangun agama yang transformatif menuju spirit *rahmatan lil'alamin*.

D.Lokus Penelitian

Penelitian tentang diseminasi *peace education* berbasis agama lokusnya di SD Bestari Utami di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Sekolah ini terbuka untuk semua kalangan dengan perbedaan latar belakang ras, agama, budaya, dan ekonomi. Pendidikan Perdamaian menjadi ciri khas sekolah ini, melalui pembentukan generasi yang menghargai keadilan, menghargai sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai prasyarat terciptanya suasana damai dan harmonis.

E.Kerangka Pemikiran

Sikap inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. Di sini didapatkan toleransi teologis dan iman. Menurut Nurcholis Madjid, sikap inklusif adalah yang memandang bahwa agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita. Inklusivisme agama hadir dalam bentuk klaim kebenaran absolut yang lebih longgar. Lain halnya dengan eksklusivisme agama, dimana orang dengan paradigma tersebut cenderung memiliki keperibadian tertutup, menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lain dan merasa bahwasanya hanya agamanya saja yang benar, sementara yang lain dianggap sesat atau kafir. Eksklusivisme dibutuhkan ketika diskursus teologi, terutama untuk mempertegas fungsi teologis suatu agama dalam masyarakat.

Paradigma itu membedakan antara kehadiran penyelamatan (*the salvation presence*) dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain, dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi “inklusif” berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus. Paradigma ini, membaca agama orang lain dengan kaca mata sendiri. Sikap beragama inklusif pun bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita²¹.

Inklusifisme sekali lagi bersifat longgar dan fleksibel terhadap sesuatu yang di luar dirinya, tidak kaku, dan memberi jalan kepada selain dirinya untuk mengakui kebenaran mereka. Pendekatan yang digunakan dalam inklusifisme keberagamaan adalah pendekatan teologis-dialogis. Sebagaimana disebutkan oleh Watt²² bahwa metode pendekatan agama melalui dialog nilai-nilai normatif masing-masing aliran atau agama. Dalam proses dialog, dibutuhkan keterbukaan antara satu sama lain, agar tumbuh saling pengertian dan pemahaman. Lanjut Watt, dialog merupakan upaya untuk saling terbuka dan belajar satu sama lain. Dia bermaksud menghilangkan sikap merendahkan agama seseorang oleh penganut agama lain, serta menghilangkan ajaran yang bersifat apologi dari masing-masing agama.

Teolog terkemuka yang menganut ini adalah Karl Rehner, yang karya-karyanya termuat dalam *The Theological investigation iyang berjilid 20, dalam “Christianity and the Non-Cristian Religions”,* jilid 5. Problem yang diberikannya adalah bagaimana terhadap orang-orang yang hidup sebelum karya penyelamatan ini itu hadir, atau orang-orang yang sesudahnya, tetapi tidak tersentuh oleh Injil? Di sini, Rehner memunculkan istilah inklusif, *the anonymous Christian* (*Kristen anonym*), yaitu orang-orang no-Kristen. Menurut pandangannya, *Kristen anonym* juga akan selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar kabar baik.

Dalam contoh Islam juga sering dikemukakan, antara lain yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah yang membedakan antara orang-orang dan agama Islam umum (yang non-Muslim *par excellence*) dan orang-orang dan agama Islam khusus (Muslim *par excellence*). Kata Islam sendiri di sini diartikan sebagai “sikap pasrah kepada Tuhan”, menurut Ibn Taymiyah bahwa : “semua nabi dan pengikut mereka seluruhnya disebut oleh Allah orang-

²¹ Victor Tanja dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 76.

²² W. Montgomery Watt dalam Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 27.

orang Muslim”. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (S.3”85): “*Barang siapa yang menganut suatu Din selain Al-Islam, maka tidak akan diterima daripadanya Din itu, dan di akhirat ia termasuk yang merugi*”. Dalam ayat lain: “*Sesungguhnya al-Din di sisi Allah adalah Islam*” (Q.S.3:19).. dalam tafsiran penganut “Islam Inklusif”, bahwa sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut al-Islam, itu tidaklah berarti bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka al-Islam dan mereka sendiri sebagai orang-orang Muslim. Itu semua peristilahan Arab. Para nabi dan rasul, dalam dakwah mereka pada dasarnya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Qur’an (S.14:4) menegaskan: “*Kami tidak mengutus seorang rasul, kecuali dengan bahasa kaumnya*”. Dengan kata lain, kalangan Islam inklusif menganut suatu pandangan bahwa agama semua nabi adalah satu²³.

Dengan demikian, paradigma inklusivisme keberagamaan akan menghasilkan dua asumsi pendukung sekaligus, yakni *pertama*, meyakinkan ideologi seseorang terhadap agamanya sendiri, dan yang *kedua*, tidak akan menimbulkan hal-hal yang merusak tatanan sosial dalam beragama karena masing-masing penganut agama saling memberi peluang terhadap agama yang lainnya.

Sikap inklusivisme dalam keberagamaan adalah cara keberagamaan yang lebih toleran, sebab didalam prakteknya sikap ini megindikasikan adanya apresiasi positif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam agama-agama itu. Sikap toleran dan apresiasi inilah yang bisa dijadikan piranti pada inklusivisme keberagamaan. Perbedaan dalam beragama dengan segala dinamikanya dipahami sebagai sesuatu yang menjadi kesadaran pluralisme pada masing-masing penganut agama, artinya perlu usaha untuk kondisi ini. Pluralitas agama adalah sebuah keniscayaan yang tidak saja wajar adanya, akan tetapi juga keniscayaan yang harus diapresiasi, dihargai, dan sekaligus dihormati sebagai pijakan menumbuhkan kedewasaan beragama.

Pembentukan kedewasaan dalam beragama tidak akan hadir sebagai realitas sosial, jika cara pandang dan cara bersikap masing-masing penganut agama masih seadanya, tidak optimal, bahkan sama sekali tidak diupayakan. Artinya mustahil inklusifisme ini hadir di tengah masyarakat yang malas toleransi, abai kemanusiaan universal, dan selalu melakukannya hanya sebatas formalitas sosial jangka pendek. Oleh karena itulah upaya pembinaan inklusivisme keberagamaan memerlukan banyak *modus* dalam bentuk model dan

²³ Budhy Munawar Rachman dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 46.

kegiatan praktis yang berorientasi ke depan, sehingga pada gilirannya melahirkan pola, *culture, style, typology, role models* dan sikap mental yang terbiasa didalam menjalani inklusivisme keberagamaan ini. Salah satu yang menurut peneliti urgen untuk dimunculkan adalah diseminasi *peace education* dikalangan anak-anak.

Model diseminasi tidak hanya secara substansi dapat mendorong percepatan pembinaan inklusivisme keberagamaan, namun juga dapat meneguhkan masa depan hadirnya generasi penerus dengan semangat yang sama. Sikap keberagamaan memiliki peranan penting dalam memunculkan pereilaku keberagamaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, sikap keberagamaan yang kurang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang kurang baik pula. Oleh karena itu untuk membentuk perilaku keberagamaan individu harus dimulai dari pembentukan sikap keberagamaan. Proses pembentukan sikap menuju perilaku dan kepribadian keberagamaan perlu dimulai semenjak dini. Proses ini adalah kerja panjang dan untuk investasi masa depan yang panjang pula. Alhasil diseminasi perlu disiapkan dengan sebaik mungkin saat individu dalam usia yang sangat muda. Dan pilihan subjek diseminasi ini adalah anak-anak di sebuah institusi pendidikan.

Ian Harris dan John Synott Harris dalam *Peace Education for New Century Social alternatives* menjelaskan bahwa *Peace Education* adalah pengajaran yang menarik bagi semua orang, karena didorong oleh beberapa faktor, yakni: *pertama*, adanya keinginan semua orang untuk hidup damai; *kedua*, adanya kebutuhan untuk mengelola atau menyelesaikan konflik tanpa rekayasa; *ketiga*, pentingnya kemampuan memahami dan menganalisis secara kritis berbagai ekspresi budaya lokal atau global dan; *keempat*, regulasi formal yang tidak menyuburkan atau memproduksi praktek-praktek ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Peace Education mengindikasikan sebuah proses pembelajaran dan penanaman sikap-sikap mental yang mengedepankan nilai-nilai positif anti kekerasan dalam menghadapi setiap permasalahan sosial keagamaan dalam mesyarakat. Pendidikan ini tentunya mengubur dalam-dalam sikap egoistik, tetapi sebaliknya mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat daripada kepentingan individual atau kelompok untuk mencapai kondisi harmonis di kalangan anggota masyarakat.

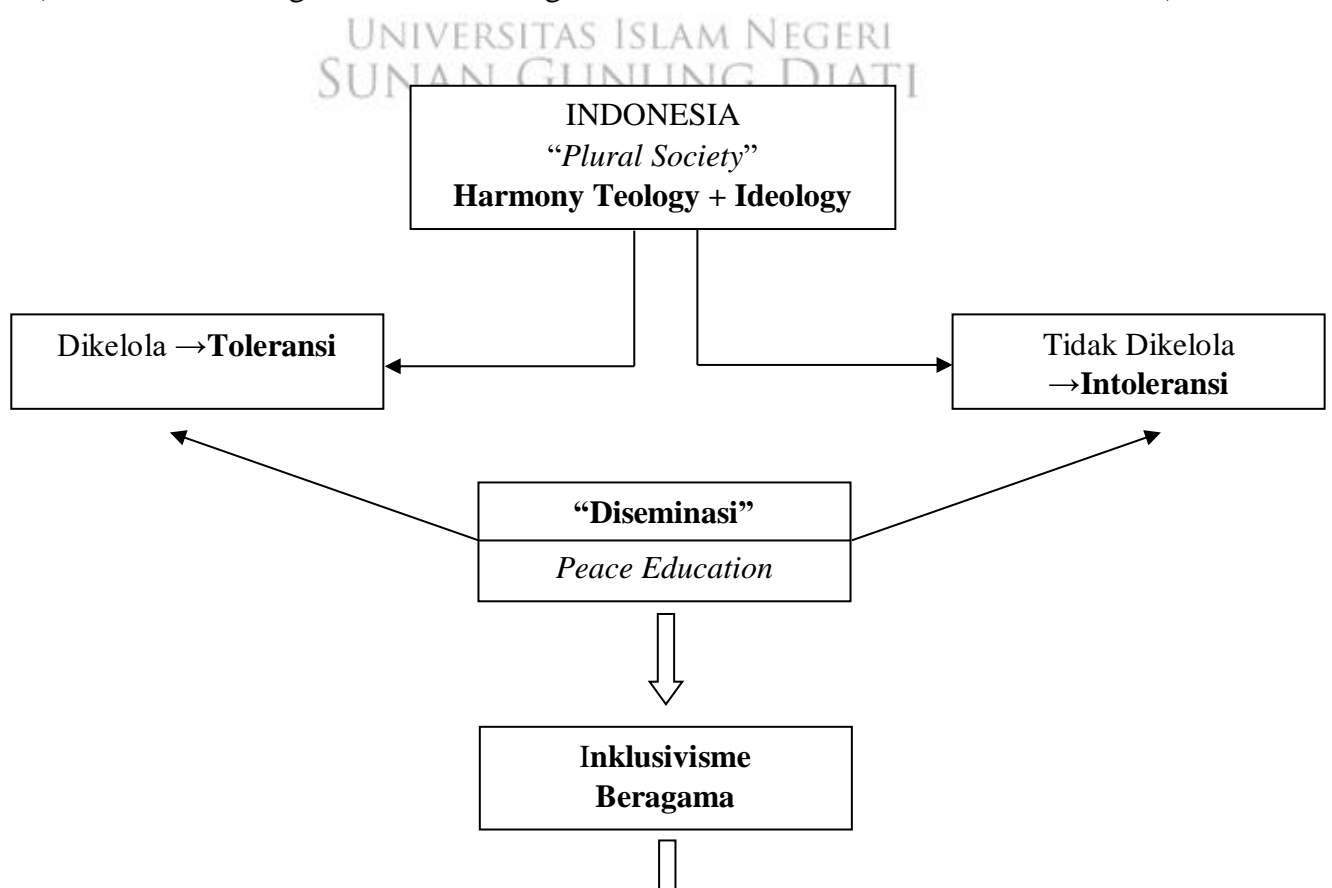
Peace Education perlu dibangun dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Diantara nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar adalah nilai-nilai yang diambil dari agama, budaya, dan juga hak-hak asasi manusia yang universal. Berkenaan dengan

pertama, bahwa hampir dalam semua agama di dunia, mengajarkan prinsip-prinsip nir kekerasan. Dalam Islam, antara lain dalam kaidah fikih *la darra wa la dirar*. Dalam Hindu, dikenal *ahimsa* yang berarti nir kekerasan. Dalam agama-agama lain, sebut saja Jainisme dan Budhisme, juga terdapat doktrin tentang nir kekerasan. Dalam tradisi Budhisme, misalnya nir kekerasan memproyeksikan sebuah cita-cita perdamaian universal, yaitu dapat diperluas menjadi mencakup ide hati atau pikiran yang damai.

Peace Education dapat menjadi media untuk mendorong komitmen setiap orang terhadap pentingnya perdamaian melalui upaya meningkatkan kepercayaannya sebagai agen perdamaian. Pendidikan perdamaian dilakukan dengan mengajarkan pada anak dan remaja tentang akibat negatif dari perang dan ketidakadilan sosial. Kepada anak dan remaja juga diinformasikan tentang pentingnya menegakkan nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial, mencintai perdamaian dunia, membayangkan indahnya masa depan tanpa konflik serta menumbuhkan untuk terus peduli terhadap sesama agar tercipta kehidupan yang harmonis. Media ini sebetulnya bukan hanya untuk menyemai perdamaian bagi pihak-pihak yang berminat hidup damai, namun juga sekaligus menjadi media untuk memperbaiki pola perilaku yang selama ini intoleran, eksklusif dan serba dogmatis. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam skema berikut :

Skema 1

Pembinaan Inklusivisme Keberagaman
Melalui Diseminasi *Peace Education*
(Penelitian Tentang Interaksi Keberagaman Anak-Anak SD Bestari Utami Garut)



Dewasa ini banyak pakar pendidikan yang telah merumuskan mengenai peran dan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan karakter kebangsaan dalam hal ini pendidikan perdamaian, karena pendidikan merupakan media proses pembangunan karakter melalui pembudayaan (*enkulturasi*²⁴). Sekolah sebagai suatu sistem, maka pembangunan karakter melalui pembudayaan ini hendaknya meliputi semua komponen yang ada di sekolah²⁵. Komponen-komponen tersebut, antara lain seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kegiatan pendidikan, dan kurikulum. Semua komponen tersebut harus diarahkan kepada pembentukan watak dan budi pekerti serta karakter kebangsaan.

Dalam Saresehan Nasional Pendidikan dan Karakter Bangsa sebagai Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa pada tanggal 14 Januari 2013, telah menyepakati hal-hal sebagai berikut: *pertama*, pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh; *kedua*, pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh; *ketiga*, pendidikan budaya dan karakter bangsa

²⁴Enkulturası adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Menurut E. Adamson Hoebel, enkulturası adalah kondisi saat seseorang secara sadar atau pun tidak sadar mencapai kompetensi dalam budayanya dan menginternalisasi budaya tersebut.

²⁵ Menurut Cohen, pembentukan kebangsaan di sekolah dapat dilaksanakan dalam suasana pendidikan yang progresif yang meliputi kurikulum terpadu (*integrated curriculum*). Integrated kurikulum inilah yang diadopsi oleh pemerintah dalam Kurikulum 2013 berupa pembelajaran tematik, yaitu berupa kegiatan menata keterpaduan berbagai materi pelajaran melalui suatu tema pembelajaran lintas bidang studi, sehingga menghasilkan pembelajaran bermakna sehingga tidak ada pemisahan antara bidang studi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian pendidikan karakter terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Selain itu Cohen juga menyebutkan hari terpadu (*Integrated day*) dan pembelajaran terpadu (*Integrated learning*).

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua; dan *keempat*, dalam upaya merevitalisasi pendidikan dan budaya karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu formasi program intensifikasi adalah diseminasi pendidikan perdamaian (*peace education*). Program ini berarti suatu proyek atau aktivitas pendidikan agama-agama dalam kerangka *peace education*. Sebagaimana dipahami, pendidikan agama juga memiliki andil besar dalam penataan eksistensi manusia di tanah air²⁶. Dalam konteks lain, bangsa Indonesia yang sesungguhnya kaya akan budaya, kerap kali tidak memiliki kepercayaan diri terhadap kebudayaan lokalnya, bahkan justru memilih melebur dengan budaya global dan mekanisme globalisasi²⁷. Hal ini menyebabkan Indonesia semakin kehilangan jati dirinya sehingga hanya menjadi kumpulan orang-orang yang tidak lagi memiliki akar kebudayaan lokal. Padahal Indonesia memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai khas yang dapat dijadikan pijakan untuk hidup bernegara. Indonesia dengan kebhinekaan dan kebesaran nusantaranya, kini kesulitan menghadapi gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat. Indonesia ibarat tidak memiliki landasan nilai-nilai kearifan lokal untuk menyelesaikan berbagai masalah. Indikator yang dapat terlihat dari uraian tersebut adalah pemuda sekarang ini seakan-akan terombang-ambing oleh arus globalisasi dan cenderung melupakan nilai luhur kebudayaan bangsa²⁸.

Dengan menjaga sekaligus melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya, diantaranya:

1. Kemauan mempelajari budaya lokal, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut memperaktekannya dalam kehidupan;
2. Keikutsertaan dalam kegiatan pelestarian kebudayaan;

²⁶ Wan Mohd Nor Wan Daud, 1989, *The Concept of Knowledge in Islam*, London: Mansell Press, hal.99-100) menyebutkan bahwa dalam konteks Islam, pendidikan Islam untuk menciptakan dasar keseimbangan bagi kepribadian manusia secara menyeluruh melalui latihan spirit manusia (*training of man's spirit*), pikiran (*intellect*), jiwa rasional (*rational self*), perasaan (*feeling*), dan rasa yang berbentuk (*bodly senses*). Karenanya pendidikan dituntut selalu menghadirkan beberapa tujuan yang harus dipenuhi, diantaranya spiritual (*afective*), intelektual (*cognitive*), dan keterampilan-keterampilan nyata (*psychomotor skills*).

²⁷ Yang dimaksud dengan globalisasi dalam konteks ini adalah dampak dari kemajuan-kemajuan teknologi, di Negara-negara maju yang produknya berimbas ke seluruh pelosok dunia, dan kebanyakan konsumennya adalah Negara-negara berkembang yang belum tentu ada kesiapan dari kemajuan-kemajuan pesat teknologi tersebut.

²⁸ Stavana Sultan, *Pengaruh Globalisasi dalam Dunia Pendidikan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 66.

3. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan;
4. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain;
5. Mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa;
6. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki dan;
7. Menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa pembinaan inklusivitas keberagaman bagi anak-anak sangatlah mendesak, dan pada bagian lain diperlukan sebuah model pendekatan agar substansi menjadi agamawan yang baik sejak dini dapat melahirkan sikap optimisme bagi arah penyiapan generasi penerus yang lebih berkemajuan.

